

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN
KARANG TARUNA DI DESA NASOL KECAMATAN CIKONENG
KABUPATEN CIAMIS**

Oleh:

Neng Yeyet

yeyetnymar@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jl. R.E. Matadinata No. 150 Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemerintah Desa kurang memberikan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi kepada organisasi Karang Taruna dalam hal pengurusan administrasi, Masih rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan Karang Taruna, Kurangnya kebersamaan antar sesama anggota Karang Taruna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis telah dilakukan meski belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan lancar, Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna seperti sulitnya untuk bertukar pikiran karena sering terjadinya perdebatan Pemerintah Desa dan Karang Taruna mengenai keinginan yang berbeda. Selain itu juga bantuan dana yang diberikan Pemerintah Desa belum maksimal dikarenakan terbatasnya bantuan dana yang diberikan, Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pembinaan Karang Taruna dengan cara memberikan arahan, serta memberikan penjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai atau bimbingan kepada para pemuda untuk merumuskan suatu visi dan misi dan juga memberikan kesempatan secara mandiri untuk mampu mengelola keuangan Karang Taruna seperti dengan mengajukan berbagai permohonan bantuan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kata Kunci: Pembinaan, Karang Taruna

A. PENDAHULUAN

Karang Taruna adalah salah satu organisasi kepemudaan di Indonesia, dimana Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa atau Kelurahan atau

komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomis produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik

sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada.

Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, keterampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat Karang Taruna yang belum optimal dalam memberikan kontribusi pada masyarakat, dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Hal itu, pada kenyataannya dikarenakan kurang adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Karang Taruna oleh Pemerintah Desa dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Nasol belum bisa memberikan pembinaan kepada Karang Taruna Desa. Hal ini terlihat dari beberapa indikator:

1. Pemerintah Desa kurang memberikan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi kepada organisasi Karang Taruna dalam hal pengurusan administrasi.
2. Masih rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan Karang Taruna.
3. Kurangnya kebersamaan antar sesama anggota Karang Taruna.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis?

2. Apa yang menjadi hambatan Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya-upaya Peran Pemerintah Desa dalam menghadapi hambatan Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis?

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peranan berasal dari kata peran. Menurut Harahap (2007:85) peranan adalah:Serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Santosa (2003:66) mengenai peranan ini, mengemukakan beberapa dimensi peran, yakni sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai

instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah di rancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya mengobati masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

2.2 Pengertian Desa

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa "Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat".

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang di serahkan pengaturannya kepala desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.3 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Surasih, 2002:23).

2.4 Pengertian Pembinaan

Menurut Warner Bruke dan Harvey Hornstein dalam Thoha (2008:208) mendefinisikan pembinaan adalah sebagai berikut "Suatu proses perubahan yang terencana. Suatu perubahan tentang kultur organisasi dari suatu keadaan yang menghindari suatu pengujian proses sosial (terutama pengambilan keputusan, perencanaan, dan komunikasi) ke suatu keadaan di mana pengujian tersebut dilembagakan dan dilegitimasi".

2.5 Tujuan Pembinaan

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Musanef (2018:16) Tujuh tujuan pembinaan pegawai:

1. Di arahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna baik dalam sektor-sektor pemerintahan maupun badan usaha milik Negara atau Swasta.
2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.
3. Diarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai, baik dalam bentuk jumlah maupun mutu yang memadai, serasi, dan harmonis, sehingga mampu menghasilkan prestasi kerja secara optimal.
4. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah sehingga pegawai hanya mengabdikan diri kepada kepentingan Negara dan masyarakat, demi terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.
5. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani maupun rohani secara adil dan merata sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan dengan sebaik-baiknya.

6. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu dan berimbang atas dasar kriteria-kriteria obyektif baik secara individu maupun secara kelompok sehingga dapat memberikan manfaat bagi instansi atau unit organisasi yang bersangkutan.
7. Diarahkan pada pembinaan prestasi kerja, yang dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Pembinaan tertib administrasi.
 - b. Pembinaan mutu.
 - c. Pembinaan kesejahteraan.
 - d. Pembinaan karier.

2.6 Landasan dan Asas-Asas Pembinaan

Asas-asas pembinaan pegawai menurut Musanef (2018:23) adalah sebagai berikut:

1. Setiap tenaga dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tugas (*mission*).
2. Penempatan orang-orang yang tepat pada jabatan-jabatan didasarkan kepada perencanaan kepegawaian yang efektif kearah *carier planning*.
3. Memperbesar kemampuan dan kecakapan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.
4. Diusahakan agar setiap orang atau pegawai berhasrat untuk mencapai prestasi kerja yang sebesar-besarnya.
5. Kesadaran nasional dipelihara dan ditingkatkan, sebagai

kepribadian pegawai Negeri Sipil sebagai anggota KORPRI.

2.7 Pengertian Karang Taruna

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010 pengertian Karang Taruna merupakan:

Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

C. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pada pendekatan deskriptif analisis, dengan tujuan utama untuk membeberkan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung dalam rentang waktu sembilan bulan, terhitung mulaibulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019. Adapun tempat penelitian yaitu di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

3.3 Subjek Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Kasi Pemerintahan
3. Ketua Karang Taruna
4. Anggota Karang Taruna
5. Tokoh Masyarakat

3.4 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data Primer

Data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara dengan penggunaan pedoman (*interview guide*) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

Sumber Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yakni data yang langsung didapat dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui dari kata-kata dan perilaku para anggota perangkat Desa Nasol yang berjumlah 2 orang dan ditambah Ketua dan anggota Karang Taruna 2 orang dan tokoh masyarakat 1 orang dan demikian sumber data yang akan diteliti sebanyak 5 orang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan literatur

yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, melalui kegiatan :

a) Observasi, yaitu, cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan unsur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Pengolahan/Analisis Data

Dalam penelitian ini, akan dianalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Pembinaan Karang Taruna oleh Pemerintah Desa di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapat dari tanggapan atau jawaban wawancara dengan responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif-kualitatif*, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Redukdi Data, Penyajian Data (*data display*), serta Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verifikasi*).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan kepada Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna. Adapun fokus kajian

dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Desa menurut Covey(2014:156) yang terdiri dari dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. *Pathfinding* (pencarian alur).
2. *Aligning* (penyelaras).
3. *Empowering* (pemberdaya).

A. Pembahasan Mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Penelitian ini dijadikan sebagai dasar penelitian yaitu mengenai peran pemerintah desa dalam pembinaan karang taruna.

Hasil penelitian untuk setiap dimensi tersebut penulis sajikan sebagai berikut:

1. *Pathfinding* (Pencarian Alur)

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa Peran Pemerintah Desa dalam pembinaan Karang Taruna dalam dimensi Pathfinding (pencarian alur) peran dalam menentukan visi dan misi karang taruna masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena sulitnya bertukar pikiran diantara pemerintah desa dan karang taruna.

Hal ini tidak sejalan dengan dimensi peran menurut Santosa (2003:66) yaitu:

Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah di rancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan bahwa peran sebagai alat berkomunikasi, dimana komunikasi sangat penting untuk mendapatkan berbagai masukan dan juga pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang diambil benar-benar matang dan dapat dilaksanakan dengan lancar.

2. *Aligning* (Penyelaras)

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna dalam dimensi *Aligning* (penyelaras) bahwasannya pemerintah desa belum melaksanakan dimensi ini dengan baik. Dimana pemerintah desa belum sepenuhnya memberikan bantuan dana untuk mencapai tujuan visi dan misi karang taruna. Sehingga apa yang menjadi tujuan ataupun kegiatan yang diadakan karang taruna sering terhambat karena hal pembiayaan.

Hal ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan pembinaan organisasi menurut Thoah (2008:216) yaitu:

Meningkatkan suatu lingkungan "kewenangan dalam tugas" yang didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan. Hal ini berarti bahwa setiap tugas dan peranan yang ada di dalamnya melekat kewenangan untuk melakukan tugas dan peran tersebut, hendaknya didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan. Tidak didasarkan atas pilih kasih, dan perasaan suka dan tidak suka. Pembinaan organisasi senantiasa dasar berpijaknya pada ilmu pengetahuan, akal sehat dan didukung adanya keterampilan-keterampilan tertentu. Bukan didasarkan atas emosi.

Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan setiap tugas harus didasarkan pada pengetahuan

dan keterampilan yang dimiliki. Karena dalam melaksanakan tugas terdapat kewenangan yang harus dijalankan dengan baik. Dimana kewenangan tersebut sudah diatur didalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

3. *Empowering* (Pemberdaya)

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa Peran Pemerintah Desa dalam pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dalam dimensi *Empowering* (pemberdaya) bahwasannya pemerintah desa belum melaksanakan dimensi ini dengan baik. Dimana pemerintah desa belum mampu sepenuhnya untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apa pun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang telah di sepakati.

Hal ini tidak sejalan dengan pedoman dasar karang taruna yang diatur permensos 77/HUK/2010 yaitu:

Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.

Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan Karang Taruna sangat penting. Hal ini di karenakan agar anggota Karang Taruna memiliki keterampilan dan juga tanggung jawab dalam menjalankan program Karang Taruna. Dimana Karang Taruna dituntut untuk memiliki kesadaran

untuk mengembangkan bakat yang dimiliki anggota Karang Taruna.

B. Pembahasan Mengenai Hambatan Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

1. *Pathfinding* (Pencarian Alur)

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan penulis dalam dimensi ini, dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melakukan pembinaan karang taruna adalah sebagai berikut:

- a. Sulitnya bertukar pikiran antara pemerintah desa dengan karang taruna.
- b. Banyaknya pendapat dalam menentukan strategi keberhasilan karang taruna, yang mana terlalu banyak keinginan yang berbeda.

2. *Aligning* (Penyelaras)

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan penulis dalam dimensi ini, dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melakukan pembinaan karang taruna adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa belum optimal dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas karang taruna sesuai dengan tugas pokok dan fungsi karang taruna karena pemerintah desa tidak terfokus pada karang taruna saja.
- b. Karang taruna belum mampu memanfaatkan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah desa.

3. *Empowering* (Pemberdaya)

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan penulis dalam dimensi ini, dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melakukan

pembinaan karang taruna adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya *miss communication* diantara Pemerintah Desa dan Karang Taruna karena perbedaan keinginan.
- b. Pemerintah Desa belum mampu mengembangkan bakat dan kreativitas yang dimiliki anggota Karang Taruna, hal ini dikarenakan permasalahan dalam finansial.

C. Pembahasan Mengenai Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

1. *Pathfinding* (Pencarian Alur)

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan penulis dalam dimensi ini, dapat diketahui adanya upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna adalah upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu Pemerintahan Desa Nasol memberikan arahan atau bimbingan kepada para pemuda untuk merumuskan suatu visi dan misi. Selain itu juga Pemerintah Desa menuntut Karang Taruna untuk berpikir kreatif dalam setiap acara dan memberikan memotivasi agar tidak selalu bergantung kepada Pemerintahan Desa.

2. *Aligning* (Penyelaras)

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan penulis dalam dimensi ini, dapat diketahui adanya upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna adalah upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada Karang

Taruna agar bisa mengembangkan Karang Taruna sesuai dengan kemampuannya. Selain itu juga Pemerintah Desa memberikan batasan terhadap bantuan dana Karang Taruna agar Karang Taruna secara mandiri mampu mencari keuangan dari berbagai pihak.

3. *Empowering* (Pemberdaya)

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan penulis dalam dimensi ini, dapat diketahui adanya upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna adalah upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengembangkan bakat dan kreativitas serta dukungan materi maupun non materi yaitu dimana Pemerintah Desa memberikan kesempatan kepada Karang Taruna untuk mengelola keuangan dengan baik sehingga Karang Taruna mampu mengembangkan bakat dan kreativitas dari keuangan yang ada.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, akhirnya peneliti mengambil kesimpulan atas penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis telah dilakukan meski belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan lancar. Seperti indikator Pemerintah membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan visi dan misi Karang Taruna, Pemerintah Desa

berperan aktif dalam menentukan strategi keberhasilan Karang Taruna, Pemerintah Desa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna, Pemerintah Desa memberikan bantuan dana kepada Karang Taruna untuk mencapai tujuan visi dan misi, Pemerintah Desa memberikan dukungan baik materimupun non materi kepada Karang Taruna, Pemerintah Desa mengembangkan bakat dan kreativitas anggota Karang Taruna.

2. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis seperti sulitnya untuk bertukar pikiran karena sering terjadinya perdebatan Pemerintah Desa dan Karang Taruna mengenai keinginan yang berbeda. Selain itu juga bantuan dana yang diberikan Pemerintah Desa belum maksimal dikarenakan terbatasnya bantuan dana yang diberikan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dengan cara memberikan arahan dengan cara memberikan penjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai atau bimbingan kepada para pemuda untuk merumuskan suatu visi dan misi dan juga memberikan kesempatan secara mandiri untuk mampu mengelola keuangan Karang Taruna seperti dengan

mengajukan berbagai permohonan bantuan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, dkk (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung.

Usman, Husaini (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Musanef, (2018). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.

Zainal, Veithzal Rivai. (2014). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Santosa. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2010.

Surasih, Maria Eni. (2008). *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.